

MEMBANGUN PUSAT DI PINGGIRAN

Pengembangan Wilayah Melalui Kerjasama Ekonomi Regional ASEAN

M. Baiquni

ABSTRACT

From the centre, frontier region is seen as an area of underdevelopment that has not been seriously managed. The multidimensional crisis occurring in Indonesia is caused by --one of many-- centralised development which has been concentrated in Java and ignores frontier areas. Efforts of developing the centre in the frontier areas have significant prospect due to economic cooperation with neighbour countries.

The global era characterised by technological transformation and informational network have brought the society living in the frontier areas to the global environment. Globalisation has opened up isolation enabling the decision makers to build new centres in frontier areas in accordance to international economic cooperation. This trend of regional economic cooperation, creating new centres in the areas that were previously marginalised, can be observed in the region of ASEAN.

This paper discusses aspects of the trend toward regional economic cooperation and offers policy alternatives to achieve sustainable development in this region.

Keywords: regional development, frontier regions, global trends

TREND GLOBALISASI : PETA BARU GEOGRAFI POLITIK

Kenichi Ohmae (1995) dalam bukunya *"The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies"* mengemukakan adanya 4 (empat) kekuatan yang bergerak bebas tanpa batas-batas negara, yaitu industri, investasi, individu dan informasi. Sinergi dari keempat I tersebut membuka batas-batas administrasi suatu negara dan membawa suatu wilayah lebih makmur dari wilayah lainnya.

Globalisasi menimbulkan perubahan konstelasi kekuatan ekonomi yang berimplikasi pada politik dan

keamanan. Di bidang politik terjadi perubahan yang drastis di awal tahun 1990an, ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet yang diikuti dengan berdirinya negara-negara baru bekas blok Soviet. Di bidang ekonomi menjelang akhir dasawarsa 1990an terjadi krisis di Asia yang menyeret negara sedang berkembang menjadi lebih miskin dan sejumlah perusahaan besar bangkrut. Di sisi lain gelombang globalisasi memberikan harapan dengan semakin besar peran swasta terutama perusahaan kecil. Globalisasi memperluas kesempatan privatisasi, bahkan mendorong perusahaan-perusahaan menjadi trans/multinasional yang menembus

batas negara dan menghadirkan *stateless company* (Muhammad, 1992). Globalisasi mendorong pula usaha dan industri kecil berperan semakin besar. Naisbitt (1994) menuliskan intisari bukunya "Semakin besar ekonomi dunia, semakin kuat perusahaan kecil". Peristiwa tersebut memberi nuansa adanya *global paradox* baik dalam bidang politik maupun ekonomi.

Gelombang globalisasi kali ini mengalami lompatan yang spektakuler yang mempengaruhi kehidupan individu, keluarga dan bangsa. Revolusi informasi telah merubah pola interaksi antar individu dan antar lapisan dalam masyarakat, bahkan antar bangsa. Jaringan bisnis yang mengglobal memanfaatkan jaringan informasi untuk menentukan keputusan investasi, pilihan industri yang dibangun dan selera konsumen individual. Era globalisasi ditandai dengan peningkatan peran swasta yang besar dalam menentukan kebijakan pembangunan. Dalam hal ini seringkali diikuti menyurutnya peran pemerintah dalam mengatur ekonomi suatu negara. Bukti paling mutakhir adalah gejolak mata uang di negara-negara ASEAN yang dipengaruhi oleh perilaku spekulasi yang memainkan psikologi massa dan mekanisme pasar yang tidak sempurna. Para spekulasi dan pemain bisnis internasional selalu berusaha memainkan keputusan investasinya untuk memperoleh keuntungan besar dari negara-negara yang sedang mengalami pertumbuhan pesat seperti ASEAN, bahkan kini para spekulasi

mengarahkan permainannya ke Jepang, Hongkong dan Cina.

Perkembangan teknologi dan modernisasi industri juga telah membawa perubahan dalam bidang rekayasa dan relokasi industri. Industri tekstil sebagai contoh kasus, telah bergeser dari Jepang ke Korea, ke Taiwan menuju Indonesia, kini bergeser ke Vietnam dan Bangladesh. Industri elektronika juga bergeser dari Jepang ke Taiwan dan kini membangkitkan ekonomi Malaysia. Dalam bidang agroindustri, Malaysia mulai mengalihkan perkebunan dan industri pengolahan karet dan minyak kelapa sawit ke Indonesia, Thailand dan Papua New Guinea. Singapura secara drastis selama dekade 70an dan 80an dengan kesadaran lingkungan yang meningkat dan dorongan memilih industri dan jasa padat modal dan *hightech*, telah memindahkan industri berat dan kotor ke Pulau Batam atau Johor, Malaysia. Negara pulau Singapura kemudian memilih industri bersih dan jasa keuangan dan perbankan sebagai *engine of growth*, sehingga ekonominya melesat ke depan bagai "angsa putih terdepan dalam formasi angsa terbang".

Perubahan pola konsumsi juga mempengaruhi produksi barang baik dalam jumlah dan kualitas. Barang elektronika produksi Sony tidak lagi diproduksi di Jepang tetapi dengan spesifikasi dan kualitas yang sama dapat diproduksi di Malaysia dan Hongkong. Barang tersebut digunakan secara luas di Eropa dan Amerika dengan produksi massal dan harga murah yang menjangkau selera

konsumen yang sedang "ngetrend". Perusahaan multi-nasional seperti Coca-Cola "dimana saja, kapan saja, rasanya sama saja" ditunjang dengan investasi, inovasi teknologi industri, informasi dengan iklan yang menarik mempengaruhi selera individu, sehingga mampu berkompetisi dan menggantikan perusahaan lokal Limun Hercules di Yogyakarta. Selera lokal telah berganti menjadi selera global, demikian pula dengan aroma wewangian, kosmetika dan mode pakaian. Perubahan pola konsumsi tidak saja persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut ekonomi politik dan lingkungan "siapa yang diuntungkan dalam perubahan global?".

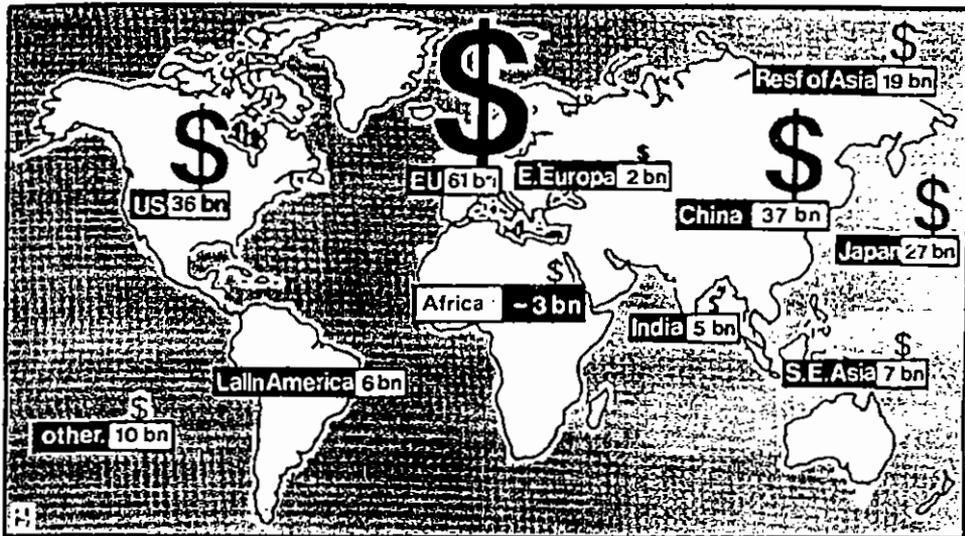
Kenichi Ohmae (1995) semakin yakin bahwa sinergi "4 I" membuat negara-negara menjadi seperti tanpa batas, digantikan dengan pertumbuhan wilayah yang semula merupakan pinggiran menjadi wilayah pertumbuhan baru melalui upaya kerjasama ekonomi regional. Pertanyaan kritis yang patut diajukan adalah apakah memang demikian halnya? Bukankah perdagangan internasional meletakkan negara kaya dan kuasa dalam posisi selalu menang?

Mengenai siapa yang memperoleh keuntungan globalisasi perdagangan, Michael Windfur (1994) menggambarkan peta baru ekonomi bahwa negara-negara maju dan besar akan menjadi pemenang dalam perdagangan dunia. Para pemenang ini yang akan menentukan peta politik baru dunia tahun 2000an nanti. Menurut Windfur, estimasi

keuntungan tahunan yang akan dihasilkan melalui perdagangan dunia hingga 2002, menghasilkan keuntungan sebanyak US\$ 209 miliar. Distribusi keuntungan tersebut tidak merata, tetapi mengumpul pada kelompok negara besar, yaitu Eropa, Cina, Amerika dan Jepang (lihat gambar berikut). Yang menarik dalam prediksi Windfur adalah Cina yang diperhitungkan sebagai salah satu pemenang dalam perdagangan internasional. Prediksi ini didukung dengan struktur ekonomi Cina yang kuat dengan agroindustri dan industri kecil/ringan yang menyerap ratusan juta tenaga kerja sebagai *comparative advantage* Cina; disamping itu ditunjang dengan integrasi ekonomi jaringan Cina perantauan (*Overseas Chinese*) yang menguasai pusat-pusat perdagangan penting dunia.

Peta baru ekonomi dunia ini sesungguhnya mencerminkan pula adanya perubahan peta politik. Pada tingkat regional nampak adanya kerjasama untuk mengembangkan wilayah pinggiran menjadi pusat-pusat baru, terutama di antara negara-negara ASEAN. Para aktor yang berperan di sini disamping pemerintah sebagai fasilitator, ditindaklanjuti dengan kerjasama dunia bisnis pelaku ekonomi dan dipererat dengan kerjasama sosial budaya masyarakat. Pemerintah berkepentingan untuk mengembangkan ekonomi wilayah yang selama ini dianggap terbelakang dan pinggiran, sedangkan kalangan pengusaha saling menjalin keunggulan komparatif di antara masing-masing pelaku.

Gambar 1. Gambar Kekuatan Ekonomi Global



Sumber: Michael Windfur. 1994. "Who Are the GATT Winners and Losers?" dalam *Development and Cooperation*. No.2/1994. DSE

WILAYAH PINGGIRAN DAN KERJASAMA EKONOMI REGIONAL

Persoalan ketertinggalan pembangunan di wilayah pinggiran pada umumnya dapat dilihat sebagai fenomena dikotomi wilayah pusat pinggiran (*centre-periphery*). Wilayah tersebut memiliki karakteristik seperti digambarkan oleh Friedmann (dalam Firman, 1997) sebagai wilayah frontier (*frontier region*). Pertama, sebagai wilayah yang kaya sumberdaya alam mineral (seperti emas, gas, minyak, bahan galian) dan sumberdaya alam hayati (seperti hutan, ikan, ternak, pertanian dan perkebunan). Sumberdaya alam ini diminati oleh perusahaan besar, diusahakan secara besar-besaran, dan dipasarkan secara besar-besaran pula

hingga menjangkau pasar global. Kedua, pasaran utama produk andalan adalah untuk ekspor guna mendatangkan devisa. Ketiga, lokasinya jauh dari pusat pertumbuhan dan wilayahnya relatif terisolir dari ibukotanya sendiri, namun lebih dekat ke pusat-pusat pertumbuhan di negara tertangga. Karakteristik seperti ini cocok untuk menggambarkan wilayah pinggiran yang sedang kita perbincangkan.

Karakteristik wilayah frontier yang dikemukakan Friedmann tersebut perlu ditambahkan dengan berbagai ciri untuk mencerminkan bahwa wilayah ini sekaligus mengalami peminggiran dalam proses, terutama berkaitan dengan keberadaan masyarakat asli. Pertama, terjadinya kesenjangan penguasaan sumberdaya alam antara masyarakat

asli dan pendatang. Para pendatang yang umumnya memiliki pendidikan lebih tinggi dan wawasan yang lebih luas dan para pengusaha besar yang memiliki teknologi, modal dan dukungan kelembagaan dapat menguasai aset sumberdaya alam. Kedua, para pendatang menguasai kegiatan ekonomi baik dalam mengimpor bahan-bahan yang diperlukan untuk konsumsi dan input produksi, maupun dalam mengeksport produk dari wilayah ini. Ketiga, kebijakan pemerintah yang cenderung memertingkan dan melanggengkan perkembangan pelaku usaha besar (investor asing dan BUMN) daripada mengembangkan program kewirausahaan kecil bagi masyarakat. Motivasi perilaku kebijakan seperti ini adalah untuk kepentingan menyedot devisa bagi pemerintah pusat. Keempat, akibat dari kondisi tersebut, maka terjadi kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat yang seringkali direspon secara agresif (gangguan keamanan) maupun apatis (kemiskinan akut). Kelima, selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi penurunan daya kemampuan tradisi budaya akibat kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan.

Persoalan kompetisi yang tidak seimbang dan tidak setara jelas akan merugikan bagi semua pihak, baik kelangsungan usaha para pendatang maupun daya hidup masyarakat. Proses marjinalisasi yang berjalan secara terus-menerus dikhawatirkan akan menimbulkan kerawanan keamanan dan kerusakan daya dukung lingkungan. Dalam proses marji-

nalisasi ini masyarakat asli mengalami kerugian berlipat yaitu kerugian akibat eksploitasi berlebihan (*over exploitation*) oleh perusahaan dan eksploitasi sendiri (*self exploitation*) oleh masyarakat akibat keterpaksaan. Kondisi semacam ini dalam jangka panjang akan melemahkan proses pengembangan wilayah, sebagai akibatnya pembangunan berkelanjutan akan mengalami kendala.

Sejumlah persoalan yang disandang oleh wilayah pinggiran memerlukan terobosan kebijakan yang mengaitkan potensi dan keunggulan wilayah seperti kedekatan dengan negara tetangga, sumberdaya alam dan tenaga kerja serta lokasi bagi relokasi industri. Trend kerjasama ekonomi regional mulai menjadi kenyataan kekuatan ekonomi baru. ASEAN sebagai sebuah kerjasama antar negara tetangga berdiri sejak ditandatangani Deklarasi Bangkok pada tahun 1967. Pembentukan perhimpunan ini didasarkan atas adanya kepentingan timbalbalik antara negara-negara Asia Tenggara, dan atas keyakinan akan perlunya memperkokoh solidaritas dan kerja sama regional dalam upaya mewujudkan stabilitas di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama ekonomi dan sosial budaya dalam menunjang pembangunan nasional masing-masing anggotanya (Sekretariat ASEAN, 1992). Selama tiga dasawarsa terakhir telah berhasil memelihara stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang cukup mengembirakan. Sungguhpun demikian pada ulang tahunnya yang ke XXX,

negara-negara ASEAN diberi "kado" para spekulasi mata uang dengan cara mengguncang dan mencuri, sehingga menimbulkan masalah ekonomi.

Kawasan ASEAN yang dikenal dengan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) secara efektif akan menjadi kawasan perdagangan bebas pada tahun 2003. Perdagangan diantara negara-negara ASEAN diharapkan akan semakin siap menghadapi liberalisasi perdagangan dunia pada 2020 nanti. Diantara negara-negara ASEAN telah terjadi perdagangan secara *mutual benefits*. Nilai ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN pada tahun 1990 mencapai 2,5 miliar US\$, sedangkan nilai impornya mencapai 2,4 miliar US\$. Pada tahun 1995 terjadi peningkatan ekspor sebesar 6,1 miliar US\$ dan nilai impor mencapai 4 miliar US\$. Sebagian besar ekspor-impor Indonesia melalui Singapura; ini berarti negara pulau itu memainkan peran penting dalam bidang perdagangan di ASEAN dan perdagangan dunia. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Ada tiga aspek penting yang

perlu diperhatikan dalam kajian kerjasama regional ini, yaitu aspek pertumbuhan ekonomi, aspek integrasi kelembagaan, aspek sinergi sosial dan lingkungan. Aspek pertama, laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN yang tinggi ditopang dengan interaksi dan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, industri, jasa dan keuangan. Kebijakan ekonomi terbuka dan kemudahan deregulasi yang dipraktekkan oleh negara-negara tersebut telah memperbesar peluang bagi keunggulan komparatif dan kemampuan kompetitif secara bersama-sama terhadap blok ekonomi lain.

Aspek kedua, integrasi kelembagaan yang merupakan wadah bagi kerjasama ekonomi agar pertumbuhan ekonomi masing-masing negara semakin kuat dan saling mendukung dalam suasana kompetisi yang sehat. Kompetisi ekonomi dengan negara tetangga seringkali merupakan potensi konflik, sehingga perlu wadah regional atau forum dialog untuk mengubah potensi konflik menjadi kerjasama ekonomi. Di kawasan ASEAN telah nampak

Tabel 1. Nilai Perdagangan Indonesia dengan negara-negara ASEAN (dalam juta US \$)

Ke/dari	1990		1995	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
Malaysia	253	326	986	676
Thailand	189	183	703	737
Philippines	161	649	590	81
Singapore	1.902	1.272	3.767	2.367
Brunei	11	0	24	1
Total	2.516	2.430	6.070	3.953

Sumber: Statistik Indonesia 1995 dikutip dari SNC Lavalin 1997

adanya kerjasama ini dalam bentuk kegiatan ekonomi regional seperti Sijori (Singapura, Johor dan Riau), IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand - Growth Triangle), BIMP-EAGA (Brunai, Indonesia, Malaysia, Philipines - East ASEAN Growth Area). Di Eropa bahkan lebih jauh lagi, telah merencanakan mata uang tunggal *Euromoney*.

Aspek ketiga, adalah kerjasama sosial dan budaya dalam rangka memperkuat dua aspek di atas. Kerjasama ini masih merupakan acara seremonial seperti festival film dan lagu ASEAN maupun acara-acara pendukung dari kegiatan utama bisnis dan diplomasi. Kerangka kerjasama antar masyarakat belum terbentuk secara kuat bila dibanding kerjasama diantara pelaku bisnis dan pemerintah. Sinergi sosial dan budaya di kawasan ASEAN sesungguhnya merupakan pilar penting yang harus ditegakkan guna menopang persahabatan antar bangsa, disamping pilar lain yaitu kerjasama ekonomi regional.

Proses kerjasama ekonomi regional merupakan upaya untuk menjalin keunggulan komparatif wilayah tersebut dan membangun keunggulan kompetitif dalam menghadapi blok ekonomi lain. Ekonomi Jepang, Kaname Akamatsu, melukiskan proses semacam itu menggunakan paradigma "Formasi angsa terbang" (Soesastro, 1990). "Angsa" paling depan memimpin ke mana arah dan manuver terbang yang diikuti oleh anggota kelompok lainnya. Singapura merupakan "angsa terdepan" bagi Sijori, Indonesia bagi

IMT-GT, dan Brunai Darussalam bagi BIMP-EAGA.

Segitiga pertumbuhan Sijori merupakan model kerjasama ekonomi regional di kawasan ASEAN yang dimulai pada pertengahan 1970an. Model ini menunjukkan adanya kepentingan bersama, meskipun masing-masing negara kepentingannya tidak sama, dapat dijalin secara sinergis menjadi sebuah kerjasama. Model lain yang sedang dikembangkan adalah kerjasama ekonomi di propinsi-propinsi Sumatra Bagian Utara (IMT-GT) dan di Propinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur (BIMP-EAGA). Kerjasama regional yang paling baru adalah AIDA (Australia Indonesia Development Area), yang merupakan kerjasama sebagian Kawasan Timur Indonesia dengan Australia.

Model kerjasama ekonomi regional "segitiga pertumbuhan" Sijori yang lebih dulu dikembangkan menunjukkan kemajuan yang saling menguntungkan, meskipun disadari masih terdapat banyak kelemahan terutama pembangunan di Batam. Replikasi model tersebut perlu dikaji dan direvisi untuk wilayah lain. Studi yang dilakukan ADB - Asian Development Bank tahun 1995 merekomendasikan lima sektor unggulan yang menjadi prioritas fokus kerjasama, yaitu: (i) perdagangan, investasi dan mobilitas tenaga kerja; (ii) transportasi dan komunikasi; (iii) pertanian dan perikanan (iv) industri dan energi, serta (v) pariwisata. Sedangkan untuk kawasan kerjasama BIMP-EAGA, ADB merekomendasikan tujuh bidang kerjasama sektoral yang meliputi: (i) pertanian, perikan-

an dan kehutanan; (ii) keuangan, investasi dan perdagangan; (iii) pariwisata; (iv) perhubungan dan komunikasi; (v) pertambangan dan enegri; (vi) pengembangan SDM (vii)

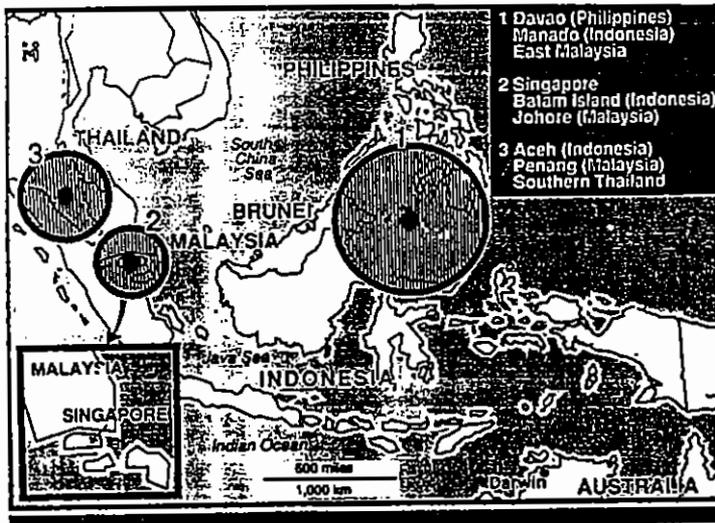
pengembangan industri (Ramelan, 1996). Wilayah yang berpartisipasi dalam kerjasama ekonomi regional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Wilayah dan Propinsi Dalam Kerjasama Ekonomi di ASEAN

Wilayah Kerjasama	Negara Yang Berpartisipasi	Propinsi Indonesia	Kawasan Andalan
Sijori	Singapura Malaysia Indonesia	Riau	Pakanbaru, Dumai, Rengat-Kuala Enok, Natuna, Zona Batam
IMT-GT	Indonesia Malaysia Thailand	DI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat	Banda Aceh, Lhoksumawe, Medan, Pematang Siantar, Rantau Prapat-Kisaran, Tapanuli, Danau Toba, Nias, Padang Pariaman, Agam Bukit Tinggi, Solok
BIMP-EAGA	Brunei Indonesia Malaysia Philipina	Sulawesi Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur	Gorontalo, Manado, Kotamobagu Pontianak, Johar-Sanggau, Singkawang, Ketawang, Kapuas Hulu, Balikpapan, Samarinda, Tanjung Redep, Tarakan, Tanah Grogot
AIDA	Australia Indonesia	KTI	Sebagian KAPET- Kawasan Andalan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Sumber: Sasono, 1993; Ramelan 1996; SNC Lavalin 1997

Gambar 2. Wilayah Kerjasama Ekonomi di ASEAN



Sumber : Development and Cooperation No.3/1994

Melalui model kerjasama seperti itu, wilayah yang selama ini dianggap pinggir dapat menjadi pusat baru. Inovasi pengembangan wilayah semacam ini yang paling penting adalah apakah masyarakat luas, terutama penduduk asli memperoleh manfaat dan kesejahteraannya meningkat. Belajar dari pengalaman Sijori, keuntungan dari kerjasama ekonomi tersebut dikuasai oleh mereka yang kuat baik dalam modal, teknologi maupun lobi. Bagi masyarakat lokal masih banyak yang belum memperoleh manfaat secara adil dari proses pembangunan di wilayahnya (Sasono, 1993). Oleh karena itu pengembangan kerjasama ekonomi regional selanjutnya perlu diikuti kemitraan diantara para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dan melakukan penguatan kelompok masyarakat secara luas.

Kerjasama ekonomi regional semacam ini diharapkan sejalan dengan proses desentralisasi dan otonomi daerah, di mana masyarakat dapat lebih berperan dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil. Tentu saja harapan ini memerlukan serangkaian upaya seperti peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan teknologi tepat guna, kemitraan usaha, dan kerjasama pengembangan ekonomi secara regional dengan negara tetangga. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan tersebut diharapkan dapat terwujud secara adil dan juga memperhatikan kelestarian sumberdaya bagi generasi

mendatang; dengan kata lain proses pembangunan diarahkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Kecenderungan kompetisi global seperti diuraikan di atas, tidak lagi mempertahankan batas kedaulatan negara secara fisik dengan cara kekuatan militer seperti Perang Dunia II atau ideologi politik seperti "Perang Dingin", tetapi merupakan perebutan ekonomi politik "Perang Duit" atau kompetisi dalam perebutan sumberdaya dan pasar. Perang seperti ini merupakan perjuangan antara berbagai kekuatan dan kelembagaan ekonomi global dengan komunitas dalam mengontrol ekonomi. David C. Korten (1996) mengemukakan bahwa:

"It is a conflict between competing goals - economic growth to maximize profits for absentee owners versus creating healthy communities that are good places for people to live. It is a competition for the control of markets and resources between global corporations and financial markets on the one hand and locally owned businesses serving local markets on the other" (Korten, 1996:4).

Pengamatan Korten ini didukung dengan berbagai argumen dan fakta bahwa kesenjangan semakin melebar antara pemain ekonomi besar seperti antara negara-negara maju dengan negara-negara miskin dan sedang

berkembang, antara *multinational companies* (MNCs) dengan pemain ekonomi lokal yang berakar pada masyarakat. Keadaan ini didukung oleh lembaga donor yang membantu program-program pembangunan negara-negara berkembang untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan perusahaan besar konglomerat di negara tersebut dan mitranya perusahaan MNCs di negara maju.

Kesenjangan yang besar tersebut diperkeruh dengan adanya berbagai persoalan kemiskinan yang membelenggu dan kerusakan lingkungan baik akibat industri besar maupun karena keadaan terpaksa oleh kemiskinan. Perkembangan pusat pertumbuhan di wilayah pinggiran memang memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi tetapi seringkali terdapat permasalahan kemiskinan di kalangan penduduk asli. Kehadiran industri eksploitasi sumberdaya, industri pengolahan maupun perdagangan banyak dimanfaatkan oleh pekerja pendatang yang memang relatif memiliki pendidikan dan ketrampilan yang lebih tinggi.

Implikasi kebijakan pertama bagi pengembangan wilayah pinggiran adalah berkaitan dengan upaya pengembangan sumberdaya manusia. Isu ini memerlukan penanganan sejak awal dan memerlukan waktu berjangka panjang dalam mempersiapkan masyarakat setempat menyongsong perubahan drastis dengan adanya pusat-pusat industri dan perdagangan yang tumbuh sebagai hasil kerjasama dengan negara tetangga. Ketersediaan

sumberdaya manusia yang berkualitas berarti menunjukkan adanya keunggulan wilayah. Disamping potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia berkualitas menjadi kunci pertumbuhan wilayah pinggiran.

Permasalahan kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia secara jelas dapat dilihat dari tiga indikator dasar, yaitu luas geografis, distribusi kependudukan, dan konsentrasi industri. Pulau Jawa dan Madura merupakan wilayah yang kecil (sekitar 7% dari luas daratan Indonesia) tetapi memiliki jumlah penduduk yang besar (hampir 70% penduduk Indonesia) dan konsentrasi industri yang tinggi (hampir 70% pula). Angka-angka ini mungkin nampak hanya perkiraan kasar dan ilustratif, namun paling tidak dapat meyakinkan bahwa pembangunan di Indonesia terlalu terpusat di Jawa, bahkan di beberapa wilayah perkotaan dan kawasan industri besar telah mengalami kejenuhan karena melebihi daya dukungnya (*carrying capacity*).

Kesenjangan semacam ini tidak terlepas dari proses sejarah masa lalu dan proses yang sedang terjadi kini, menyangkut pemusatan dan konsentrasi kekuasaan, kebijakan, modal, teknologi, dan sumberdaya manusia yang terkait dengan pemusatan pertumbuhan ekonomi di Jawa dan Bali. Sumatra dan pulau-pulau sekitarnya memiliki akselerasi pertumbuhan dari hasil-hasil eksploitasi dan ekstraksi sumberdaya alam dan yang penting adalah berdekatan dan terkait dengan pusat-pusat pertum-

bahan negara tetangga ASEAN yaitu Thailand, Malaysia dan Singapura. Kawasan ini memiliki 2 segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) yaitu Sijori (segitiga pertumbuhan Singapura, Johor, Riau) dan IMT-GT (segitiga pertumbuhan Medan, Penang dan Phuket).

Pulau-pulau di kawasan KTI seperti Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya dan pulau-pulau lain, memiliki kekayaan alam besar tetapi prosentase jumlah penduduknya rendah, masing-masing di bawah 7% dan sektor industrinya masih kecil, masing-masing dibawah 8%. Keadaan ini merupakan indikator yang menunjukkan bahwa masalah kesenjangan antar kawasan terjadi sebagai akibat konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi di KTB. Kesenjangan semacam ini diperparah oleh adanya sentralisasi kekuasaan di pusat (Jakarta) selama masa Orde Baru. Jakarta dapat diibaratkan seperti mesin "*Vacum cleaner*" yang menyedot keuntungan eksploitasi sumberdaya alam di luar Jawa. Maka tidak heran setelah rezim Orde Baru jatuh, sejumlah kalangan di Aceh, Irian Jaya dan Timor Timur menginginkan perubahan menuju otonomi.

Implikasi kebijakan yang penting adalah menata kembali hubungan pusat dan daerah baik dalam bidang politik (misalnya penentuan kepala daerah) maupun bidang ekonomi (misalnya pengelolaan sumberdaya alam sebagai sumber pendapatan). Masyarakat perlu berperan secara nyata dalam penentuan pemilihan kepala daerah melalui peningkatan

peran DPRD dan mengurangi intervensi pusat. Dengan demikian masyarakat di wilayah pinggiran akan merasa berkepentingan untuk mewarnai corak pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan cocok dengan karakteristik di daerahnya.

Selama ini dapat kita cermati berbagai proses pembangunan yang sentralistis menimbulkan kerusakan daya hidup masyarakat dan kemerosotan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan. Pembangunan dengan menekankan pada pertumbuhan ekonomi dengan mengeksploitasi sumberdaya alam seringkali menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi bahkan kerawanan politik dan keamanan. Persoalan ini dapat diakibatkan oleh berbagai sebab, seperti: kebijakan sektoral dan daerah yang tidak sesuai dengan karakter sumberdaya dan dinamika masyarakat, ketamaman investor dalam mengeksploitasi sumberdaya alam, juga kadang-kadang sebagai akibat kelalaian masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumberdaya sekitarnya.

Berkaitan dengan perdagangan global, sebuah penelitian dari Hani Handoko et al. 1997 tentang "*Impact of Free Trade on Industrial Pollution: Do Pollution Havens Exist?*" yang mengemukakan isu perdagangan dan lingkungan yang muncul akhir-akhir ini merupakan matarantai siklus perdagangan internasional. Salah satu kesimpulan studi dikemukakan antara lain, bahwa rata-rata tingkat ekspansi produk kotor

meningkat di negara-negara sedang berkembang daripada di negara-negara maju selama dekade terakhir.

Temuan studi tersebut mengingatkan kita pada trend pembangunan dua dekade lalu dengan strategi relokasi industri yang ternyata mengindikasikan bahwa banyak industri kotor direlokasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Ketika kesadaran lingkungan merembak tahun 1970an di negara-negara maju, maka muncul desakan masyarakat konsumen dan kebijakan pemerintah untuk "membuang" industri-industri kotor dan teknologi usang yang tidak efisien lagi dioperasikan di negara-negara maju. Tenaga kerja di negara maju semakin mahal dan lingkungan bersih menjadi dambaan, sehingga teknologi padat karya dan industri kotor dijual, ditransfer dan direlokasi ke negara-negara berkembang.

Pada waktu itu negara berkembang seperti Indonesia sedang giat-giatnya membangun, sehingga apa saja bentuk relokasi industri dan investasi usaha cenderung diterima. Indonesia juga dihadapkan pada bagaimana memberikan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi rakyatnya. Sayangnya kebanyakan upaya itu dilakukan di Jawa, di kota-kota pantai utara dan wilayah tengah seperti di Bandung dan Solo. Konsentrasi industri di kota-kota Jawa hasil relokasi industri kotor dan campuran aneka ragam jenis industri tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi konsentrasi ekonomi ini telah menimbulkan

kesenjangan ekonomi Jawa vs luar Jawa.

Kondisi ketimpangan dan eksploitasi sumberdaya secara keliru semacam ini tidak dapat berlanjut terus, karena akan membawa dampak lingkungan dan mengganggu kelangsungan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif pembangunan dan kerusakan lingkungan tidak hanya dapat dipecahkan secara teknis, tetapi memerlukan seperangkat kebijakan ekonomi dan kemauan politik bahkan perlu penafsiran baru etika dan nilai-nilai.

Implikasi kebijakan berikutnya adalah merealisasikan upaya-upaya menuju pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini mengacu pada keadilan yang harus ditegakkan secara antar generasi, atau pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Dengan kondisi semacam itulah, Agenda 21 Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang.

Daftar Pustaka

- Firman, Tommy. 1997. "Pengembangan Sumberdaya Alam dan Perekonomian Lokal: Industri Pengolahan Kayu di Maluku Utara". *Majalah Prisma* 3, Maret 1977. Halaman 63-79. LP3ES. Jakarta.
- Handoko, Hani et al. 1997. *Impact of Free Trade on Industrial Pollution; Do Pollution Havens Exist?*. Working Paper No. 1 - Januari 1997. Inter University

- Center for Economic Studies, Gadjah Mada University. Yogyakarta.
- Korten, David. 1996. "The Truth about Global Competition: The Economic Myths Behind Globalization". In *Development and Cooperation*, No. 3/1996. Deutsche Stiftung fur Internationale Entwicklung (DSE). Berlin.
- Muhammad, Fadel. 1992. *Industrialisasi dan Wiraswasta: Masyarakat Industri Belah Ketupat*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Naisbitt, John. 1994. *Global Paradox*. William Morrow and Company Inc.
- Ohmae, Kenichi. 1995. *The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies*. Harper Collins Publishers. London.
- Ramelan, Rahadi. 1996. *Beberapa Pokok Pemikiran Dalam Rangka Pengembangan Kerjasama Sub-Regional ASEAN*. Kertas Kerja Rakornas Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) diselenggarakan Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, September 1996. Tidak diterbitkan.
- Sasono, Adi dkk (ed.). 1993. *Pembangunan Regional dan Segitiga Pertumbuhan*. CIDES-Center for Information and Development Studies. Jakarta
- Sekretariat Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. 1996. *Tantangan dan Peluang Investasi Di Kawasan Timur Indonesia*. Jakarta.
- Soesastro, Hadi. 1992. "Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Pasifik Barat Hingga Tahun 2010 dan Implikasinya Bagi Permintaan Energi" *Analisis CSIS Tahun XXI No. 6/1992*. Centre for Strategic and International Studies. Jakarta.
- SNC Lavalin International Inc. 1997. *North Sulawesi: Its Economy and Future Challenge*. Proyek Pembinaan Pengairan Sulawesi Utara/P3SU dan Canadian International Development Agency (CIDA) Project. Project Report/ Unpublished
- Windfuhr, Michael. 1994. "Who Are the GATT Winners and Lossers?" In *Development and Cooperation* No 2/1994. Deutsche Stiftung fur Internationale Entwicklung (DSE). Berlin.